



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2025 disusun berdasarkan Ranwal RKPD Perubahan tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas sesuai dengan Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu: **“PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”**

Demikian kiranya, semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG,**



Drs. AMPERA SH, M.Si.
NIP. 19680101 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI dan	
INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	
sampai dengan Triwulan I	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi	
dan Informatika	23
2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN	
INFORMATIKA	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	41
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
BAB IV PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.....	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	20
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.....	23
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025.....	28
Tabel 3.1	Permasalahan dan Isu Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika & Statistik Prov Sumatera Barat 2021 – 2026	39
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029.....	42
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan perkiraan maju 2026.....	44
Tabel 3.4	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman kepada Rencana Strategis OPD.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 didasarkan atas hasil evaluasi renja OPD pada Triwulan I yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini juga selaras dengan Rancangan awal Renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2029 yang mengakomodir program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Perubahan Tahun 2025 guna mencapai Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu: **“PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”**

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
 17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
 18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang mungkin terjadi, termasuk dalam hal ini penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang baru atau perubahan anggaran yang tidak terduga serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien dalam penataan ulang prioritas dan alokasi anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. Sementara itu tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk :

1. Adaptasi terhadap dinamika situasi yang mempengaruhi perencanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti perubahan kebijakan, anggaran, atau kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan lebih relevan, realistis dan sesuai dengan kondisi terbaru dilapangan;
3. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi, untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Menjamin Ketercapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dengan menyusun ulang target yang lebih realistis berdasarkan evaluasi capaian sebelumnya, untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra);

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun berkenan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 5 (lima) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI S/D MARET 2025

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20,885,917,655	-	8,202,020,031	-	4,810,847,000		2,184,200,863		2,184,200,863		10,386,220,894	58%	49.73%	-
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20,760,067,655		8,186,106,031		4,810,847,000		2,182,501,088		2,182,501,088	47.16%	10,368,607,119	100%	49.94%	-
A	Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100%	10,687,474,255	33%	4,405,984,883	42%	2,229,968,100	42%	1,879,656,738	100%	1,879,656,738	42%	6,285,641,621	100%	58.81%	
I		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	8,577,970,155	33%	3,568,305,179	42%	1,057,391,000	42%	899,531,271	100%	899,531,271	42%	4,467,836,450	100%	125.21 %	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.050 orang/bulan	8,577,970,155	392 org/bulan	3,568,305,179	100	1,057,391,000	168	899,531,271	100	899,531,271	492	4,467,836,450	46.86 %	52.09%	
II		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	12,500,000	100%	14,000,000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	14,000,000	112%	112.00 %	
2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	12,500,000	28 paket	14,000,000	0	-	0	-	0	-	28	14,000,000	112%	112.00 %	
III		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	785,737,700	33%	287,591,257	42%	57,593,050	42%	40,297,098	42%	40,297,098	42%	327,888,355	42%	41.73%	
3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24,423,000	4 paket	7,766,000	1 paket	1,980,000	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	7,766,000	5 paket	31.80%	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	77,207,800	4 paket	33,164,500	1 paket	8,213,000	1 paket	3,349,500	1 paket	3,349,500	5 paket	36,514,000	5 paket	47.29%	
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	34,106,900	12 paket	3,940,200	3 paket	4,400,050	3 paket	1,134,000	3 paket	1,134,000	15 paket	5,074,200	15 paket%	14.88%	
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	650,000,000	24 laporan	242,720,557	6 laporan	43,000,000	6 laporan	35,813,598	6 laporan	35,813,598	6 laporan	278,534,155	6 laporan	42.85%	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
IV		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	105,000,000	33%	34,250,000	42%	11,129,800	42%	6,225,000	42%	6,225,000	42%	40,475,000	113%	38.55%	
7		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	105,000,000	35 unit	34,250,000	1 unit	11,129,800	1 unit	6,225,000	1 unit	6,225,000	36 unit	40,475,000	113%	38.55%	
V		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	775,440,000	33%	296,200,247	42%	301,065,501	42%	307,122,098	42%	307,122,098	42%	603,322,345	42%	77.80%	
8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	330,000,000	36 laporan	99,597,987	9 laporan	26,757,501	9 laporan	16,445,494	9 laporan	16,445,494	45 laporan	116,043,481	42%	35.16%	
9		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	445,440,000	12 laporan	196,602,260	3 laporan	274,308,000	3 laporan	290,676,604	3 laporan	290,676,604	15 laporan	487,278,864	42%	109.39 %	
VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	430,826,400	33%	205,638,200	42%	27,286,000	42%	17,925,700	42%	17,925,700	42%	223,563,900	42%	51.89%	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	261,506,400	7 unit	165,850,200	7 unit	21,626,000	7 unit	17,240,700	7 unit	17,240,700	7 unit	183,090,900	8%	70.01%	
11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	90,000,000	1 unit	26,658,000	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	26,658,000	0%	29.62%	
12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	162 Unit	79,320,000	54 unit	13,130,000	54 unit	5,660,000	30 unit	685,000	30 unit	685,000	84 unit	13,815,000	52%	17.42%	
B		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	45.00%	3,608,803,900	99,80	2,063,555,688	44,5%	800,441,900	0%	283,271,000	99.80%	283,271,000	99.80%	2,346,826,688	225%	65.03%	
VII		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)	29000 followers	3,608,803,900		2,063,555,688	28000 follower	800,441,900	37.014 follower	283,271,000	37.014 follower	283,271,000	37.014 follower	2,346,826,688	132%	65.03%	
13		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	1,355,071,200	1 dokumen	305,444,806	0	61,224,900	0	2,785,600	0	2,785,600	1 dokumen	308,230,406	33%	22.75%	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah rilis berita mengenai informasi pembangunan daerah	3300 rilis		1150 rilis		330 rilis		330 rilis		330 rilis	-	1480	-	45%		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria atau juknis					4 media		1 media						25%		
14		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	646,742,700	1 dokumen	156,261,382	1 dokumen	4,410,000	0 dokumen	-	0	-	1 dokumen	156,261,382	33%	24.16%	
			Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)	2.625 konten	-	1044 konten		213 konten		300 konten		300 konten	-	1344	-	51%		
			Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	15 OPD	-	0 OPD		5 OPD		0		0	-	0	-	0%		
			jumlah permohonan informasi publik	na		na		1 permohonan		0								
15		Layanan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	15 Layanan	1,539,600,000	5 layanan	1,485,526,500	5 layanan		5 layanan		5 layanan	-	5 layanan	1,485,526,500	33%	96.49%	
			Jumlah pertemuan jumpa pers	24 kali		6 kali		2 kali		1 kali		1 kali	-	7 kali	-	29%		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	6 edisi		1 edisi		0		0		0	-	0	-	0%		
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: terverifikasi dewan pers, terdaftar di dinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media	na		na		8 Laporan	734,807,000	1 laporan	280,485,400	1 laporan			280,485,400	6%		
16		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	67,390,000	1 dokumen	9,846,000	1 dokumen		0		0	-	0	9,846,000	0%	14.61%	
			Jumlah web KIM	6 website	-	2 website		2 website		0		0	-	0	-	0%		
			Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	3 pelatihan	-	1 pelatihan		1 pelatihan		0		0	-	0	-	0%		
		Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah Komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di diskominfo	na		na		2 komunitas	14,199,450	0	-	0		0		0%		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Penyediaan/Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	na		13	106,477,000			0		0		0	106,477,000	0%		
C		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3,80 Indeks	6,463,789,500	2,90 indeks	1,716,565,460	3,60 indeks	1,780,437,000	0	19,573,350	0	19,573,350	0	1,736,138,810	0%		
VII I		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Aplikasi	6,463,789,500	2 aplikasi	1,716,565,460	2 aplikasi	1,780,437,000	0	19,573,350	0	19,573,350	0	1,736,138,810	0%	26.86%	
			Indeks Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik	4,10	-	3,70												
			Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,20	-	4,00												
17		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	833,860,800	1 dokumen	110,129,041	1 dokumen		0		0	-	1 dokumen	-	33%	0.00%	
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Aplikasi	-	2 aplikasi	2 aplikasi		0		0	-	2 aplikasi	-	20%			

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			0	-	4 aplikasi	248,263,000	2 aplikasi	1,070,000	2 aplikasi	248,263,000	2 aplikasi	1,070,000	0%	0.00%	
18		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	3 Dokumen	5,629,928,700	1 dokumen	1,716,565,460	1 dokumen	-	0	-	0	-	1 dokumen	1,716,565,460	33%	30.49%	
				21 jenis	-	7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis	-	7 jenis	-	33%		
		Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang di sediakan oleh dinas	na		na	1,908,819,200	23 OPD	1,532,174,000	23 OPD	18,503,350	23 OPD		23 OPD		0%	0.00%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			90,000,000		6,088,750				404,775	35%	404,775	35%	6,493,525	35%	7.22%	
D	Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	100%	90,000,000	71%	6,088,750	35%	4,080,000	0%	404,775	35%	404,775	35%	6,493,525	35%	7.22%	
IX		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	90,000,000	3 dokumen	6,088,750	1 dokumen	4,080,000	0	404,775	0	404,775	1 dokumen	6,493,525	33%	7.22%	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase metadata statistik sektoral yang berkualitas	100%		35%		35%		0%		35%	-	35%	-	35%		
19		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	90,000,000	1 dokumen	6,088,750	1 dokumen	4,080,000	0	404,775	0	404,775	1 dokumen	6,493,525	33%	7.22%	
			Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	9 dokumen	-	3 dokumen		3 dokumen		0		0	-	0	-	0%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			35,850,000		9,825,250				1,295,000	0	1,295,000	0.379487179	11,120,250	38%	31.02%	
E		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks KAMI	585 indeks	35,850,000	222 indeks	9,825,250	375 indeks	9,680,000	0	1,295,000	0	1,295,000	38%	11,120,250	38%	31.02%	
X		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	3 pelatih an	35,850,000	1 pelatihan	9,825,250	1 pelatihan	9,680,000	0	1,295,000	0	1,295,000	1 pelatihan	11,120,250	33%	31.02%	
			Nilai Aspek Tata kelola Keamanan Informasi	63 point	-	33 point		0		0		0	-	33	-	52%		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	35,850,000	1 laporan	9,825,250	1 laporan	9,680,000	0	1,295,000	0	1,295,000	1 laporan	11,120,250	33%	31.02%	
			Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	3 pelatiha n	-	1 pelatihan				0			-		-			
					20,885,917,655	-	8,202,020,031	-	4,810,847,000	-	2,184,200,863	11.67%	2,184,200,863	1	10,386,220,894	173%	29.39%	-
Rata-rata capaian kinerja %											45%		45%	0%	50%			
Prediket Kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																		

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Kominfo sampai dengan triwulan I pada Tahun anggaran berjalan adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil monitoring dan evaluasi pada akhir maret, untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dari target sebesar 30% baru terealisasi sebesar 23% atau dengan persentase capaian kinerja fisik sebesar 76%. Sementara itu terkait dengan realisasi keuangan, dari target sebesar 28% dapat terealisasi sebesar 19 % atau dengan capaian kinerja sebesar 68 %. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan disebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang mengalami refocusing anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Capaian Kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Indikator kinerja program persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 60% atau sesuai target. Dari 5 (lima) bentuk kegiatan yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kegiatan yang capaiannya dibawah target yakni pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dikarenakan adanya pengadaan yang tidak bisa direalisasikan terkait dengan efisiensi anggaran.
3. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dengan target sebesar 44,50%, untuk capaian belum bisa dihitung karena terkait dengan pelaksanaan diseminasi informasi selama 1 (satu) tahun. Sementara untuk capaian indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah follower pada laman resmi Kominfo Padang Panjang (instagram) sebanyak 28.000 follower adalah sangat baik dimana berdasarkan insight Instagram kominfo Padang Panjang jumlah followers sudah mencapai 37.403 follower atau capaian 132 %. Hal ini didukung oleh kinerja Kominfo yang massif dalam menyebarluaskan informasi kegiatan terutama sekali melalui media sosial. Untuk capaian kinerja sub kegiatan pada umumnya belum terealisasi sesuai target dikarenakan banyaknya anggaran yang mengalami efisiensi.

4. Capaian kinerja Program Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja berupa indeks domain tata kelola SPBE sebesar 3,70 belum dapat diukur karena penilaian SPBE belum dimulai. Sementara untuk capaian kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan sebanyak 2 (dua) aplikasi, sudah terealisasi sesuai target. Kecuali untuk indikator indeks aspek layanan administrasi public dan pemerintahan berbasis elektronik termasuk yang belum bisa diukur.
5. Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator persentase data statistik sektoral yang berkualitas sebanyak 70% juga belum bisa diukur karena akan dilaksanakan diakhir tahun. Capaian indikator kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen, dan persentase metadata statistic sektoral yang berkualitas belum terealisasi sesuai target. Salah satu faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah terbatasnya jumlah SDM yang mengelola urusan Statistik.
6. Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator indeks keamanan informasi (keamanan informasi) sebesar 385 indeks, belum bisa diukur karena akan dilaksanakan diakhir tahun.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dimana penyusunan program dan kegiatan diarahkan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yakni urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T1	Indeks SPBE				3	3,10	3,20	2,93	3,16	3,16	3,20	
S1	Indeks domain layanan SPBE				2,60	2,80	2,90	3,26	2,60	2,60	2,80	
IP	Indeks domain tata kelola SPBE				3,60	3,70	3,70	2,40	3,60	3,60	3,70	
IP	Nilai indeks KAMI				375	385	385	222	375	375	385	
IP	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				44%	44,50%	44,50%	100%	44%	44%	44,50%	
S2	Indeks domain pembangunan statistik				2,80	3,00	3,00	na	1,94	1,94	3,00	
IP	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas		√		35%	70%	70%	Na	35%	35%	70%	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√		100%	100%	100%	54%	100%	100%	100%	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan		√		44%	44,5%	44,5%	100%	44%	44%	44,5%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		√		71%	78%	78%	34%	78%	78%	78%	

Dari tabel tersebut di atas, terkait dengan pencapaian indikator kinerja pelayanan pada Renstra dan Indikator Kinerja Kunci per Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan Renstra “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja Indeks SPBE. Pada Tahun 2025 indeks SPBE Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 3,10, sementara untuk capaian akhir tahun 2024 sudah mencapai nilai 3,16 dengan artian sudah melewati target Renja 2025. Target dan proyeksi capaian untuk perubahan renja 2025 disamakan dengan realisasi 2024 dikarenakan tidak dilaksanakannya penilaian SPBE untuk kota Padang Panjang pada tahun ini oleh Kemenpan RB.
2. Indikator Sasaran Strategis meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas dengan Indikator Indeks domain layanan SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) ditargetkan sebesar 2,80 , sementara untuk capaian tahun 2024 sudah didapat nilai 3,26 atau sudah melebihi target Renja pada tahun 2025. Target dan proyeksi capaian untuk perubahan renja 2025 disamakan dengan realisasi 2024 dikarenakan tidak dilaksanakannya penilaian SPBE untuk kota Padang Panjang pada tahun ini oleh Kemenpan RB.
3. Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan) dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan target indeks 3,00, Untuk Indeks ini capaian pada tahun 2024 baru mencapai 1,94 . Target dan proyeksi capaian untuk perubahan renja 2025 disamakan dengan realisasi 2024 dikarenakan tidak dilaksanakannya penilaian IPS untuk kota Padang Panjang pada tahun ini oleh BPS.
4. Indikator kinerja kunci (IKK) terkait dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan terkait kominfo, statistik dan persandian, capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan target 100%, pada tahun 2024 sudah mencapai target begitu juga pada tahun 2025.
 - b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, pada tahun 2024 baru terealisasi sebesar 78,6%. Adapun penyebab rendahnya capaian kinerja pada indikator ini terkait dengan masih adanya kendala mengintegrasikan beberapa layanan publik Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan hasilnya baru akan diperoleh pada akhir tahun 2025.
 - c. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 99,8%, sementara untuk tahun 2025 diproyeksikan akan sesuai target dan hasilnya baru akan diperoleh pada akhir tahun.

- d. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 100%, sementara untuk tahun 2025

diproyeksikan akan sesuai target dan hasilnya baru akan diperoleh pada akhir tahun.

- e. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 100%, sementara untuk tahun 2024 diproyeksikan akan sesuai target dan hasilnya baru akan diperoleh pada akhir tahun 2024.
- f. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah, pada tahun 2024 pencapaian indikator ini berada dibawah target dimana dari target sebesar 52 baru terealisasi 34,42. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur pengamanan informasi yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Sementara itu untuk capaian 2025 diproyeksikan sesuai target yakni sebesar 57.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Digital	1. Tidak tersedianya dokumen perencanaan strategis SPBE (Arsitektur dan Peta Rencana). 2. Masih terbatasnya skalabilitas koordinasi internal
		Belum optimalnya pengelolaan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital	Masih adanya sistem informasi layanan publik dan administrasi pemerintah yang belum terintegrasi
		Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI belum memadai	1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan pengelola Teknologi Informasi 2. Terjadinya gangguan keamanan informasi (<i>cyber attack</i>)
		Masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia Digital	1. Terbatasnya upaya peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan workshop digitalisasi
2	Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas informasi publik	1. Terbatasnya konten informasi yang berkualitas, inklusif dan partisipatif 2. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah melalui medsos, website, dan media luar ruang.

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			3. Perlunya penguatan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi informasi pembangunan 4. Masih rendahnya kapasitas pranata humas yang ada di OPD sehingga publikasi informasi masih terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika
		Belum optimalnya pelayanan permohonan informasi publik	1. Terbatasnya ketersediaan Daftar Informasi Publik 2. Belum optimalnya peran PPID pembantu (OPD) dalam mengelola informasi
		Belum optimalnya pengelolaan layanan pengaduan masyarakat	1. Belum tersedianya regulasi/tatakelola layanan pengaduan 2. Masih minimnya sosialisasi dan informasi keberadaan kanal aduan 3. Perlunya meningkatkan koordinasi lintas OPD untuk pengelolaan pengaduan yang responsif
3	Terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Belum optimalnya tata Kelola statistik sektoral	1. Belum tersedianya kebijakan tentang penerapan Aspek Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi yang berlaku bagi seluruh Produsen Data 2. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi penyelenggara

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			statistik sektoral 3. Terbatasnya Kompetensi SDM pengelola statistik
4.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya capaian kinerja OPD	1. Masih rendahnya pemahaman dan komitmen organisasi terkait dengan penjenjangan kinerja 2. Belum tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas. 3. Terbatasnya skalabilitas monitoring dan evaluasi kinerja. 4. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan.

Dari tabel di atas, beberapa isu strategis yang ada pada Dinas Kominfo dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, terutama dalam integrasi penyelenggaraan layanan publik ke dalam satu aplikasi yang dapat mempermudah akses layanan publik, informasi daerah, promosi pariwisata, dan pengaduan warga secara cepat dan transparan melalui aplikasi Padang Panjang Barcode.
2. Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah, terkait dengan masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia terutama di OPD dalam menyediakan konten informasi dan mempublikasikan informasi melalui media.
3. Kualitas dan validitas data statistik sektoral sebagai dasar dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan, membutuhkan peningkatan kapasitas pengelola data baik yang ada di Dinas Kominfo sebagai walidata dan OPD sebagai penyedia data.
4. Masih rendahnya kesadaran terhadap pengamanan informasi dan seringnya terjadi serangan cyber (cyberattack).

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan 5 (lima) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan Belas) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 7.505.913.153. Dibandingkan dengan renja tahun 2025 terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan. Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil analisa kebutuhan untuk perubahan Anggaran 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8,377,522,415	6,817,115,209	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,848,844,809	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8,377,522,415	6,817,115,209	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8,848,844,809	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8,297,636,415	6,807,760,209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,289,489,809	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 Persen	100 Persen	5,346,475,965	5,145,515,809	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 Persen	5,152,225,909	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	3,518,508,865	3,518,508,865	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	3,518,508,865	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/ bulan	392 Orang/ bulan	3,518,508,865	3,518,508,865	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/ bulan	3,518,508,865	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	278,455,100	120,169,575	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	120,169,575	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7,921,500	4,750,440	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,750,440	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31,778,000	15,888,510	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15,888,510	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16,969,000	5,138,725	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5,138,725	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	221,786,600	94,391,900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94,391,900	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaaan	100 persen	100 persen	12,300,000	6,289,900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaaan	100 persen	13,000,000	
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	12,300,000	12.300.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13,000,000	BM pencacah kertas
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	1,393,254,000	1,389,696,269	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	1,389,696,269	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	107,030,000	103,600,269	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	103,600,269	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,286,224,000	1,170.249.048	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,286,096,000	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	143,958,000	02143.958.00 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	110,851,200	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	91,280,000	73,127,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	73,127,200	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	1 Unit	26,908,000	13,454,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	13,454,000	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	2 unit	25,770,000	24,270,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 unit	24,270,000	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	44,50 Persen	44,50 Persen	1,370,723,450	802,717,400	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	44,50 Persen	1,477,736,900	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)	28.000 followe rs	28.000 followe rs	1,370,723,450	802,717,400	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)	28.000 followe rs	1,477,736,900	
2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	4 Media	4 Media	168,471,000	21,649,900	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	4 Media	21,649,900	
2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 permohonan	1 permohonan	13,246,000	3,552,000	Pelayanan Informasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 permohonan	32,077,000	penambahan BM PC dan Laptop untuk progul pengelolaan Kanal lapor pengaduan warga sebesar Rp. 28.525.000

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 16 02 2.01 0014	Relasi Media	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : terverifikasi dewan pers, terdaftar didinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media	8 Lapora n	8 Lapora n	1,174,807,000	777,515,500	Relasi Media	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : terverifikasi dewan pers, terdaftar didinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media	8 Lapora n	1,424,010,000	kecukupan belanja spanduk dan media Rp.646.494.50 0
2 16 02 2.01 0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisemina sikan Informasi dan terdaftar di diskominfo	2 Komuni tas	0 komuni tas	14,199,450	-	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisemina sikan Informasi dan terdaftar di diskominfo	0 komuni tas	-	dihilangkan terkait refocusing
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks domain tata kelola SPBE	3,70 Indeks	3,70 Indeks	1,580,437,000	859,527,000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks domain tata kelola SPBE	3,70 Indeks	1,659,527,000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah n Berbasis Elektronik yang Dikembangk an	4 aplikas i	4 aplikas i	1,580,437,000	859,527,000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah n Berbasis Elektronik yang Dikembangk an	4 aplikas i	1,659,527,000	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintaha n Berbasis Elektronik	3,90	3,90					Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintaha n Berbasis Elektronik	3,90		
			Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintaha n Berbasis Elektronik	4,00	4,00					Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintaha n Berbasis Elektronik	4,00		
2.16.03.2.02. 0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi	248,263,000	14,685,000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	4 Aplikasi	14,685,000	
	Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatka n Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perang kat Daerah	23 Perang kat Daerah	1,332,174,000	844,842,000	Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatka n Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perang kat Daerah	1,644,842,000	penambahan internet 5 bulan, video wall CC 3 unit @100.000.000
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					19,480,000	5,505,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				5,505,000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 Persen	70 Persen	19,480,000	5,505,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 Persen	5,505,000	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokum en	3 dokum en	19,480,000	5,505,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokum en	5,505,000	
			Persentase Metadata Statistik Sektoral yang berkualitas	70%	70%					Persentase Metadata Statistik Sektoral yang berkualitas	70%		
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	100 persen	19,480,000	5,505,000	Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	5,505,000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					60,406,000	3,850,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				553,850,000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	indeks KAMI	385 indeks	385 Indeks	60,406,000	3,850,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	indeks KAMI	385 indeks	553,850,000	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Peruba han	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semul a	Menjad i	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatih an	1 pelatih an	60,406,000	3,850,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatih an	553,850,000	
			Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi		57					Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi	57		
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lapora n	1 Lapora n	60,406,000	3,850,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lapora n	553,850,000	Belanja Firewall @550.000.000

Dibandingkan dengan pagu pada APBD awal TA 2025 sebesar Rp 8.377.522.415,- yang mengalami refocusing melalui pergeseran APBD menjadi Rp. 6.817.115.209 terjadi penambahan belanja sebesar Rp.531.295.618. Penambahan belanja tersebut dialokasikan pada penambahan kecukupan belanja internet selama 5 (lima) bulan dan penambahan belanja infrastruktur yang mendukung pada Program Unggulan Kepala Daerah terpilih.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam proses penyusunan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kominfo juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Persandian dan Statistik Sektorial yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai Provinsi yang Clean Government;
2. Meningkatkan sebaran informasi kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
3. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektorial yang untuk Pembangunan Daerah;
4. Mewujudkan penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE;

5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Tabel 3.1
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra Dinas Kominfo dan Statistik
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan 2021-2026
1.	Belum optimalnya implementasi SPBE.	a. perlunya intervensi pemerintah pusat dan provinsi dalam mengatasi blank spot dan pengembangan taman digital dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, b. optimalisasi keterlibatan provider dengan kabupaten/Kota dalam menyediakan akses layanan telekomunikasi c. pemerintah provinsi akan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong meningkatkan nilai indeks SPBE (terutama pada Kabupaten/Kota yang nilai indeks SPBEnya pada kategori kurang/cukup) d. pemanfaatan SPLP dan mall multidomain.	Terwujudnya Implementasi SPBE.

2.	Belum optimalnya penyebaran informasi publik	a. Mengupayakan integrasi layanan call ceter yang sudah ada ke dalam satu layanan call center terpadu. b. mendorong integrasi situs PPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung penilaian keterbukaan informasi publik. c. optimalisasi peran dan kinerja diskominfo sebagai leading sektor dalam pengelolaan SP4N LAPOR d. mendukung kebijakan pembentukan Komisi Informasi di Kabupaten/Kota.	Meningkatnya Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan startegis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
3.	Belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas	a. penguatan fungsi walidata pendukung pada setiap OPD, b. menjadikan Indeks Penyelenggaraan Statistik menjadi Indikator Kinerja Daerah pada tahap RPJMD berikutnya serta integrasi aplikasi BPS dengan portal satu data,	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang lengkap dan berkualitas.
4.	Belum optimalnya pelaksanaan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Mengarahkan dan memfasilitasi kabupaten/kota yang belum memiliki CSIRT agar menyiapkan data dan kebutuhan persiapan peluncuran CSIRT	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029. Dinas Komunikasi dan informatika berperan dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yakni ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif”***, dengan sasaran **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital**. Sasaran ini sekaligus menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode Renstra 2025-2029. Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		KET
						RENSTRA 2025- 2029 (Tahun 2025)	PERUBAHAN RENJA 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital		Indeks SPBE	Angka	3.16	3.16	3.16	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	70.90	71	71	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	30.70	30.70	30.70	
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	80.90	81	81	
		Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	1.94	1.94	1.94	

3.3 Program dan Kegiatan

Pada perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merencanakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapann Belas) sub kegiatan. Sedikit berbeda dengan RKPD 2025, pada perubahan RKPD 2025 terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, hal ini terkait dengan terjadinya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Padang Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,377,522,415	6,817,115,209				6,205,577,427
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8,377,522,415	6,817,115,209				
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,297,636,415	6,807,760,209				6,196,222,427
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 Persen	100 Persen	5,346,475,965	5,145,515,809			100 Persen	5,233,987,827
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	3,518,508,865	3,518,508,865			100 persen	3,614,842,727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	3,518,508,865	3,518,508,865	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350 Orang/bulan	3,614,842,727
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	278,455,100	120,169,575			100 Persen	128,891,900
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7,921,500	4,750,440	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	3,000,000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31,778,000	15,888,510	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	10,000,000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16,969,000	5,138,725	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	221,786,600	94,391,900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Laporan	110,891,900
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 persen	100 persen	12,300,000	6,289,900			100 Persen	7,000,000
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	12,300,000	6,289,900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	7,000,000
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							1 Unit	7,000,000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	1,393,254,000	1,389,696,269			100 Persen	1,393,126,000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	107,030,000	103,600,269	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Laporan	107,030,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,286,224,000	1,286,096,000	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1,286,096,000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	100 Persen	143,958,000	110,851,200			100 Persen	83,127,200
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	91,280,000	73,127,200	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	73,127,200
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	26,908,000	13,454,000	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	10,000,000
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit	25,770,000	24,270,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	44,50 Persen	0.00%	1,370,723,450	802,717,400			0.00%	962,234,600
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	na	77					78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)	28.000 followers	na	1,370,723,450	802,717,400			0	962,234,600
		Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	na	100%					100%	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	4 Media	4 Media	168,471,000	21,649,900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Media	68,167,100
2.16.02.2.01	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 permohonan	12 permohonan	13,246,000	3,552,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 permohonan	6,552,000
2.16.02.2.01	Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : terverifikasi dewan pers, terdaftar didinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media	8 Laporan	60 laporan	1,174,807,000	777,515,500	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 laporan	887,515,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.02.2.01	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di diskominfo	2 Komunitas	0	14,199,450	-	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	2.90 Indeks	2.90 Indeks	1,580,437,000	859,527,000			0 Indeks	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 aplikasi	0	1,580,437,000	859,527,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	
		Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	0				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	
		Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,00	0				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	
		Persentase capaian pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	0	100%					100%	
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	4 Aplikasi	1 aplikasi	248,263,000	14,685,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 aplikasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.03.2.02.0030	Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	1,332,174,000	844,842,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Perangkat Daerah	
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				19,480,000	5,505,000				5,505,000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70%	0%	19,480,000	5,505,000			0%	5,505,000
		Nilai domain prinsip SDI		2.5					2.5	
		Nilai domain kualitas		2.3					2.7	
		Nilai domain proses bisnis		2.7					2.92	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	0	19,480,000	5,505,000			0	5,505,000
		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang berkualitas	70%	0%					0%	
		Persentase capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah		100%					100%	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	100 persen	19,480,000	5,505,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	5,505,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				60,406,000	3,850,000				3,850,000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks KAMI	385 indeks	0	60,406,000	3,850,000			0	3,850,000
		Tingkat Kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	na	82					87	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatihan	0	60,406,000	3,850,000			0	3,850,000
		Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi	57	0					0	
		Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	na	100					100	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	60,406,000	3,850,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	3,850,000

Berdasarkan tabel di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dirinci sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

ii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain :

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan, antara

lain :

- i. Pengelolaan Media Komunikasi.
- ii. Pelayanan Informasi Publik.
- iii. Relasi Media.

3) Program Aplikasi Informatika dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- ii. Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor dengan 1 (satu) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor.

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi dengan 1 (satu) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 sesuai SIPD dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.4

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025**

Tabel 3.4

Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8,153,848,881	8,377,522,415	7,505,913,153							8.110.273.711,00		
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8,153,848,881	8,377,522,415	7,505,913,153							8.110.273.711,00		
	2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8,153,848,881	8,377,522,415	7,505,913,153							8.030.387.711,00		
93	2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 %		100 %	100 %	100 %	5,322,794,431	5,346,475,965	4,934,313,753							5.279.219.261,00		
	2.16.01.2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	3,466,728,931	3,518,508,865	3,423,153,761			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		3.423.153.761,00	Kominfo	
	2.16.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2282 Orang/bula n		392 Orang/bula n	392 Orang/bu lan	392 Orang/bul an	3,466,728,931	3,518,508,865	3,423,153,761	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		3.423.153.761,00	Kominfo	
	2.16.01.2.06 .	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	306,553,500	278,455,100	120,169,575			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		306.553.500,00	Kominfo	
	2.16.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	7,921,500	7,921,500	4,750,440	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		7.921.500,00	Kominfo	
	2.16.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	31,778,000	31,778,000	15,888,510	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		31.778.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	16,969,000	16,969,000	5,138,725	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		16.969.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	249,885,000	221,786,600	94,391,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		249.885.000,00	Kominfo	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	2.16.01.2.07 -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	12,300,000	12,300,000	6,289,900			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	12.300.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit		Unit	5 Unit	2 unit	12,300,000	12,300,000	6,289,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12.300.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.08 -	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	1,393,254,000	1,393,254,000	1,273,849,317			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1.393.254.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	107,030,000	107,030,000	103,600,269	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		107.030.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,286,224,000	1,286,224,000	1,170,249,048	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.286.224.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.09 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	143,958,000	143,958,000	110,851,200			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	143.958.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		1 Unit	7 Unit	7 Unit	91,280,000	91,280,000	73,127,200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		91.280.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	26,908,000	26,908,000	13,454,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		26.908.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	174 Unit		30 Unit	54 Unit	54 Unit	25,770,000	25,770,000	24,270,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		25.770.000,00	Kominfo	
94	2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	82 %		NA %	44,50 %	77 %	970,731,450	1,370,723,450	1,202,717,400						970.731.450,00		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
	2.16.02.2.01.-	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	82 %		NA %	NA %	100%	970,731,450	1,370,723,450	1,202,717,400		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	970.731.450,00	Kominfo		
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	249 Laporan		60 Laporan	8 Laporan	60 Laporan	734,807,000	1,174,807,000	1,127,515,500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		734.807.000,00	Kominfo	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas	0	14,199,450	14,199,450	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		14.199.450,00	Kominfo	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	64 Permohonan		NA Permohonan	1 Permohonan	12 Permohonan	13,246,000	13,246,000	3,552,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		13.246.000,00	Kominfo	
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	22 Media		4 Media	4 Media	4 Media	208,479,000	168,471,000	71,649,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		208.479.000,00	Kominfo	
95	2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.90 angka		2.90 angka	2.90 angka	2.90 angka	1,780,437,000	1,580,437,000	1,359,527,000					1.780.437.000,00			
			Nilai aspek strategi dan rencana	1,66 Angka		NA Angka		NA Angka											
			Nilai aspek tata kelola	2,35 Angka		NA Angka		NA Angka											
			Nilai aspek teknologi digital	3,66 Angka		NA Angka		NA Angka											
	2.16.03.2.02.-	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan e-government	100 persen		NA persen	NA persen	100 persen	1,780,437,000	1,580,437,000	1,359,527,000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	1.780.437.000,00	Kominfo		
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Aplikasi		NA Aplikasi	4 Aplikasi	1 Aplikasi	248,263,000	248,263,000	14,685,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		248.263.000,00	Kominfo	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	1,532,174,000	1,332,174,000	1,344,842,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.532.174.000,00	Kominfo	
	2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG STATISTIK						19,480,000	19,480,000	5,505,000						19,480,000,00		
96	2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai domain prinsip SDI	3,6 Angka		2,5 Angka	NA	2,5 Angka	19,480,000	19,480,000	5,505,000						19,480,000,00		
			Nilai domain kualitas	3,5 Angka		2,3 Angka	NA	2,3 Angka											
			Nilai domain proses bisnis	3,6 Angka		2,7 Angka	NA	2,7 Angka											
	2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	100 Persen		NA Persen	NA Persen	100 Persen	19,480,000	19,480,000	5,505,000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	19,480,000,00	Kominfo		
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %		0 %	100 %	100 %	19,480,000	19,480,000	5,505,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		19,480,000,00	Kominfo	
	2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERSANDIAN						60,406,000	60,406,000	3,850,000						60,406,000,00		
97	2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	100 Nilai		78 Nilai	NA	82 Nilai	60,406,000	60,406,000	3,850,000						60,406,000,00		
	2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 persen		NA persen	NA persen	100 persen	60,406,000	60,406,000	3,850,000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	60,406,000,00	Kominfo	
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60,406,000	60,406,000	3,850,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		60,406,000,00	Kominfo	

Dalam perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, dibandingkan dengan renja Awal terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat. Pengurangan Sub Kegiatan ini terkait dengan terjadinya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025, sehingga penganggaran diutamakan pada sub kegiatan pendukung program prioritas dan indikator kinerja utama perangkat daerah. Dengan pengurangan tersebut, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan renja 2025 meliputi 5 (lima) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan.

Sementara itu untuk indikator terdapat beberapa penyesuaian terhadap target kinerja yang disebabkan oleh berbagai pertimbangan atas kondisi yang terjadi terutama terkait dengan keterbatasan anggaran. Lebih lanjut masing masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan

Informatika, Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 100%. Program ini dirinci dalam 5 (lima) bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut.

- a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja persentase layanan keuangan perangkat daerah sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 392 orang/bulan.
- b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 paket.

- ii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 6 paket.
 - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 4 paket
 - iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD sebanyak 24 laporan.
- c. **Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
- i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan sebanyak 2 unit.
- d. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah sebesar 100%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain:
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 36 laporan.
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
- e. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas yang di pelihara sebanyak 7 unit (3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2).

- ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 (satu) unit.
- iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 54 (lima puluh empat) unit.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) dengan target 77%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

a. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator Persentase capaian kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan target sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, antara lain :

- i. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis sebanyak 4 media.
- ii. Pelayanan Informasi Publik dengan indikator kinerja Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan sebanyak 13 permohonan.
- iii. Relasi Media dengan indikator Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : terverifikasi dewan pers, terdaftar didinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media sebanyak 60 laporan.

3. Program Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja berupa indeks domain tata kelola SPBE sebesar 2.90. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase capaian kinerja Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah dengan target sebesar 100%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebanyak 1 (satu) aplikasi,
- ii. Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas sebanyak 23 OPD.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator nilai domain prinsip SDI sebesar 2.5, nilai domain kualitas sebesar 2.3 dan nilai domain proses bisnis dengan nilai 2.7. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - i. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan atau Penyusunan Kebijakan sebanyak 100%.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi dengan target nilai sebesar 82. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

- a. **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan target 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator kinerja jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 1 laporan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada triwulan I sekaligus adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi dalam rangka proses transisi dari Renstra RPD tahun 2024-2026 ke Renstra tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisa terhadap berbagai faktor dan kondisi yang mungkin akan berpengaruh pada pencapaian pelaksanaan program/kegiatan serta menyusun ulang target yang lebih realistis guna pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka pada Perubahan anggaran tahun 2025 ini Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 5 (lima) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Sedikit berbeda dengan Renja Tahun 2025, pada perubahan ini terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan dan penyesuaian pada beberapa target kinerja. Penyesuaian dan rasionalisasi anggaran di beberapa sub kegiatan terpaksa dilakukan terkait dengan keterbatasan/refocusing anggaran pada awal tahun 2025. Banyak upaya tetap harus dilakukan agar capaian kinerja tetap dapat maksimal diakhir periode Renstra 2024-2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juni 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. AMPERA, SH, M.Si

NIP.19680101 199803 1 010